

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NASIONALISME

1. Pengertian Nasionalisme

Secara etimologis kata Nasionalisme, akar kata dari *nation* yang berarti bangsa dan *isme* adalah paham, kalau digabungkan arti dari Nasionalisme adalah paham cinta bangsa (tanah air)¹. Kata *nation* itu sendiri berasal dari kata *nascie* yang berarti dilahirkan. Jadi *nation* adalah bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Sedangkan secara antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat-istiadat².

Mengenai pengertian Nasionalisme banyak tokoh yang berpendapat, diantaranya Hans Khon berpendapat bahwa Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan³.

Sedangkan menurut Lothrop Stoddard, "Nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa, suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan dalam bentuk kebersamaan"⁴.

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, "Nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara"⁵.

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu,

610 ¹Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.

²Badri Yatim, *Soekarno Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 57

³Hans Kohn, *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1984), h. 11

⁴Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam* (t.p., t.p., t.th.), h. 137

⁵Nazaruddin Sjamsuddin, (ed.), *Soekarno (Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek)* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), cet. I, h. 37

berdaulat, demokratis dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara dan mengabdikan identitas, persatuan, kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan⁶.

Nasionalisme dalam Bahasa Arab diartikan sebagai *al syu'ubiyyah* atau menurut pendapat lain disebut juga *al wat'aniyah* menurut Frank Dhont yang dikutip Zudi Setiawan didefinisikan sebagai paham dan proses di dalam sejarah ketika sekelompok orang merasa menjadi anggota dari suatu bangsa (*nation*) dan mereka secara bersama-sama ingin mendirikan sebuah negara (*state*) yang mencakup semua anggota kelompok tersebut⁷.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Nasionalisme ialah suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Untuk mewujudkan kesadaran tersebut dibutuhkan semangat patriot dan prikemusiaan yang tinggi, serta demokratisasi dan kebebasan berfikir sehingga akan mampu menumbuhkan semangat persatuan dalam masyarakat yang pluralis.

Maka Nasionalisme sangat bernilai spiritual, artinya sesuatu yang sangat berhubungan dengan kejiwaan seseorang dan bisa menjadi sumber nilai pada dirinya. Oleh karena itu Nasionalisme pada diri seseorang akan mampu mendorongnya untuk mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk bangsa. Hal ini sebagaimana yang telah dibuktikan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat Nasionalisme mereka rela mengorbankan segala yang dimilikinya tanpa pamrih untuk membebaskan tanah airnya dari belenggu penjajahan.

Sebagai paham kebangsaan Nasionalisme mengandung prinsip-prinsip atau unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Persatuan; merupakan manifestasi dari

⁶Departemen Pendidikan RI, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), Jilid 11, h. 31

⁷Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU* (Semarang: Aneka Ilmu, 2007), h. 25

Cinta tanah air yang berimplikasi pada setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara semua yang ada di atas tanah airnya. Sehingga muncul kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan inilah yang menurut Bung Hatta sebagai prinsip Nasionalisme yang pertama⁸. Kedua, Pembebasan; nasionalisme merupakan pengakuan kemerdekaan perseorangan dari kekuasaan atau pembebasan manusia dari penindasan perbudakan⁹. Nasionalisme dalam konteks inilah yang akan membangun segenap keadaan realitas manusia tertindas menuju manusia yang utuh. Kemajemukan (pluralis) pada dasarnya bukan menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam sebuah tatanan negara, apalagi berbagai suku yang ada di Indonesia mempunyai kesamaan emosional sebagai bekas jajahan kolonial Belanda. Karena dengan kemajemukan yang mempunyai latar belakang sama tersebut unsur kebersamaan dalam rangka menghadapi imperialisme dan kolonialisme dapat dibangun dalam bingkai Nasionalisme. Ketiga, Patriotisme; ialah semangat cinta tanah air; sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya¹⁰, Sehingga Nasionalisme meliputi patriotisme.

Watak Nasionalisme adalah “watak kemerdekaan, pembebasan, pertolongan dan mengangkat kaum kecil dan miskin ke harkat-martabat kemanusiaan yang adil dan beradab”¹¹. Dengan sendirinya posisi Nasionalisme sangat strategis, yaitu sebagai pendorong dalam rangka membebaskan dari segala belenggu penindasan dan membangkitkan kasih yang senasib dan seperjuangan, menumbuhkan keberanian dan perasaan ingin melindungi terhadap sesama serta mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bangsa dan negara merupakan kesatuan komunitas masyarakat pluralis yang di dalamnya terdapat berbagai macam unsur yang saling melengkapi yang

⁸Sartono Kartodirjo, *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), Cet. 1, h. 19

⁹ Hans Kohn, *op. cit.*, h. 22

¹⁰Depdikbud, *op. cit.*, cet. 8, h. 737

¹¹YB. Mangunkusumo, “Republik Sekarang Sudah Berubah Jauh”, dalam Eko Prasetyo, (eds), *Nasionalisme, Refleksi Kritis Kaum Ilmuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. I, h. 125

diatur dalam sebuah sistem dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nasionalisme tidak dibatasi oleh suku, bahasa, agama, daerah dan strata sosial. Nasionalisme memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup¹². Kemajemukan masyarakat bukanlah penghalang untuk mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita dalam hidup bernegara ketika Nasionalisme dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan yang pluralis. Dengan Nasionalismelah masyarakat yang serba pluralis dapat bersatu padu dalam bingkai persamaan hak dan demokratisasi. Atau dalam bahasanya Ruslan Abdul Gani adalah Nasionalisme yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Perikemanusiaan yang berorientasi internasionalisme, ber-Persatuan Indonesia yang patriotik, ber-Kerakyatan atau demokrasi serta berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat¹³.

Sedangkan cita-cita Nasionalisme menurut Hertz ada empat macam; Pertama, Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan dalam politik, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta solidaritas. Kedua, Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau campur tangan dari dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang bersifat anti nasional atau yang hendak mengesampingkan bangsa dan negara. Ketiga, Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (*separateness*), pembedaan (*distinctiveness*), individualitas dan keaslian (*originality*). Keempat, Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan diantara bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh¹⁴.

Dengan demikian kata kunci dalam Nasionalisme adalah kesetiaan, yang muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan

¹²Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I* (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), Cet. 3, h. 76

¹³Lazuardi Adi Sage, *Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam* (Jakarta: Citra Media, 1996), h. 64

¹⁴Abdul Choliq Murod, *Nasionalisme Dalam Perspektif Islam* (Semarang: Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XVI, 2011), h. 48

lainnya. Pada kebanyakan kasus kesetiaan itu terjadi karena kesamaan keturunan, kebudayaan, bahasa. Akan tetapi semua unsur bukanlah unsur yang substansial, sebab yang ada dalam Nasionalisme adalah kemauan untuk bersatu.

2. Faktor Historis Munculnya Nasionalisme

Nasionalisme merupakan fenomena abad modern walaupun akar-akar Nasionalisme dapat dirunut sejak zaman Yunani kuno¹⁵. Nasionalisme akan muncul ketika suatu kelompok suku yang hidup di suatu wilayah tertentu dan masih bersifat primordial berhadapan dengan manusia-manusia yang berasal dari luar wilayah kehidupan mereka¹⁶. Dilihat dari sejarah munculnya, Nasionalisme mula-mula muncul menjadi kekuatan penggerak di Eropa Barat dan Amerika Latin pada abad ke-18¹⁷. Di Amerika Utara misalnya, bahwa Nasionalisme lahir karena perluasan dibidang perdagangan. Ada pula yang berpendapat bahwa manifestasi Nasionalisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-17, ketika terjadi revolusi Puritan¹⁸. Namun dari beberapa pendapat tersebut dapat dijadikan asumsi bahwa munculnya Nasionalisme berawal dari Barat (yang diistilahkan oleh Soekarno sebagai Nasionalisme Barat)¹⁹ yang kemudian menyebar ke daerah-daerah jajahan.

Perasaan yang mirip dengan Nasionalisme sudah banyak dimiliki oleh rakyat waktu itu, meskipun hanya sebatas pada individu saja (fanatisme pribadi) yang muncul jika ada bahaya yang mengganggu atau membahayakan eksistensi mereka (masyarakat koloni) atau keluarga serta golongan mereka²⁰. Di antara sekian dokumen paling awal mengenai penggunaan kata ini adalah famplet yang ditulis oleh pastur Sieyes dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara

¹⁵*Ibid.*, h. 46

¹⁶Decki Natalis Pigay Bik, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), cet. I, h. 55

¹⁷*Ensiklopedi Nasional Indonesia, op. cit.*, jilid 11, h. 31

¹⁸Badri Yatim, *op. cit.*, h. 64

¹⁹Nazaruddin Sjamsuddin, (ed.), *op. cit.*, h. 41

²⁰Hans Kohn, *op. cit.*, h. 12

yang disusun pada saat Revolusi Prancis pada 1789. Seiring dengan munculnya kapitalisme diberbagai negara Barat. Sejak itulah istilah “Nasionalisme” mulai muncul untuk merujuk pada daya hidup kekuasaan rakyat baru yang di Prancis ternyata tidak hanya sanggup untuk menumbangkan raja tetapi kerajaan itu sendiri. Juga bukan sekedar koloni yang melepaskan diri melainkan di salah satu negara absolut mapan yang tertua di Eropa²¹. Maka sejak zaman Nasionalisme inilah keberadaan dan sikap rakyat banyak memegang peranan penting yang akhirnya digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan negara serta mensahkan bentuk diktatorisme birokrat baik secara kenegaraan maupun kepentingan pribadi. Sifat dan warna Nasionalisme Barat cenderung pada bentuk kapitalisme, menindas rakyat, imperialisme dan saling menyerang²².

Perkembangan konsep Nasionalisme dapat dilihat pertama kali untuk membedakannya dengan negara. Negara bisa diartikan sebagai konsep hukum dan teritorial tentang tanah dan penguasanya. Sementara ide baru tentang bangsa kemudian mengubah konsepsi tentang ini. Sejak abad ke-19, bangsa menjelma dalam teori Nasionalisme yang meletakkan dalam satu gagasan identifikasi komunitas budaya dan politik kedalam satu sistem universal negara-bangsa²³. Menurut Buzan, sebagaimana yang dikutip oleh Rusli Karim, bahwa negara diartikan pada fungsi pemberian tatanan sipil, barang-barang fiktif dan ketahanan eksternal. Sementara bangsa bisa berarti satu kelompok besar manusia yang memiliki budaya yang sama dan mungkin juga ras dan warisan yang sama, serta biasanya hidup dalam satu kawasan.

Hubungan atau dialektika antara negara dan bangsa bisa dilihat dalam empat bentuk²⁴, yaitu: Pertama, bangsa negara seperti Jepang. Tujuan negara

²¹Roger Griffin, “Nasionalisme” dalam Roger Eatwell dan Anthony Right (ed), *Ideologi Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2004), h. 211

²²Badri Yatim, *op. cit.*, h. 173

²³Eko Presetyo et. al, *Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 4

²⁴M. Ruslin Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 7-8

adalah melindungi dan mengekspresikan bangsa dan pertalian diantara negara dan bangsa begitu erat dan saling mendukung. Kedua, negara-bangsa, karena negara memainkan peranan instrumental dalam pembentukan bangsa dari pada sebaliknya. Negara melahirkan dan mengembangkan unsur budaya yang seragam seperti bahasa, kesenian, adat dan hukum. Contohnya, Amerika Serikat, Australia dan lain-lain. Ketiga, “*part-nation state*”, yaitu satu bangsa yang di bagi menjadi dua atau lebih negara dimana penduduknya berasal dari bangsa yang sama seperti Cina dan Korea, dan Keempat, “*multi nation-state*”, yang terdiri dari beberapa negara dengan beberapa bangsa. Corak ini terbagi menjadi federatif dan imperial.

Selain dilihat dari hubungannya dengan bangsa, Nasionalisme bisa diklasifikasikan dalam empat bentuk. Pertama, Nasionalisme liberal yang merupakan produk tertua. Kedua, Nasionalisme konservatif. Pada awal abad 19, kelompok konservatif mengecam Nasionalisme karena dianggap sebagai kekuatan radikal yang membahayakan, tetapi kemudian pengecam ini malah mendukung. Ketiga, Nasionalisme syionisme. Di beberapa negara, Nasionalisme dihubungkan dengan agresifitas dan militerisme, pada akhir abad ke-19, begitu banyak Eropa menjajah dunia ketiga, maka Nasionalisme di Afrika tampil impresif sebagai simbol agresif melawan imperialisme. Keempat, Nasionalisme anti kolonialisme. Nasionalisme disini ikut membantu menimbulkan perlawanan terhadap kaum imperialis, timbul rasa kebangsaan dari keinginan membebaskan bangsa²⁵.

Melihat Nasionalisme Indonesia yang dalam perkembangannya mencapai titik puncak setelah Perang Dunia II yaitu dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia berarti bahwa pembentukan nasion Indonesia berlangsung melalui proses sejarah yang panjang. Ada dua macam teori tentang pembentukan nation. Pertama, yaitu teori kebudayaan (kultur) yang menyebut suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan.

²⁵*Ibid*, h. 14

Kedua, teori negara (staat) yang menentukan terbentuknya suatu negara lebih dahulu adalah penduduk yang ada di dalamnya disebut bangsa, dan ketiga, teori kemauan (wils), yang mengatakan bahwa syarat mutlak yaitu adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa, tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku dan agama²⁶.

Timbulnya Nasionalisme Indonesia khususnya Nasionalisme Asia umumnya berbeda dengan timbulnya Nasionalisme di Eropa. Jelas bahwa Nasionalisme Indonesia mempunyai kaitan erat dengan kolonialisme Belanda yang sudah beberapa abad lamanya berkuasa di bumi Indonesia²⁷. Usaha untuk menolak kolonialisme inilah yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan-tekanan yang disebut Nasionalisme.

Mengenai muncul dan perkembangan Nasionalisme Indonesia Prof. Wertheim dalam Taufik Abdullah menjelaskan sebagai suatu bagian integral dari sejarah politik, terutama apabila ditekankan pada konteks gerakan-gerakan Nasionalisme pada masa pergerakan nasional. Wertheim juga menambahkan bahwa faktor-faktor perubahan ekonomi, perubahan system status, urbanisasi, reformasi agama Islam, dinamika kebudayaan, yang semuanya terjadi dalam masa kolonial telah memberikan kontribusi perubahan reaksi pasif dari pengaruh Barat kepada reaksi aktif dari pada Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme bukan semata-mata proses integrasi pada tahap awal, akan tetapi integrasi itu mencapai puncak tertinggi yaitu terbentuknya nasion Indonesia. Bukan sesuatu yang berlebihan kalau integrasi politik dipakai pegangan dalam melihat proses terbentuknya bangsa Indonesia²⁸.

Ada dua faktor yang mendorong segi-segi integrasi dari Nasionalisme Indonesia. Pertama, faktor internal yang menunjukkan persamaan perasaan karena

²⁶Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si. dan Encep Supriatna, M. Pd., *Buku Ajar Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo 1908 Hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945)*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2008), h. 123

²⁷Roeslan Abdulgani, *Penggunaan Ilmu Sejarah* (Bandung: Prapanca, 1964), h. 16

²⁸Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si. dan Encep Supriatna, M.Pd., *op. cit.*, h. 3

tekanan-tekanan kolonial sehingga menciptakan perasaan senang-tidak senang, setia-melawan, setuju-tidak setuju, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, adalah factor eksternal berupa faham-faham Nasionalisme yang membuahkan Nasionalisme itu sendiri. Faktor-faktor eksternal maupun internal itu tidak akan banyak berpengaruh jika sekiranya kaum intelektualis tidak muncul dalam panggung organisasi politik dan organisasi pergerakan nasional. Sebagai elit baru kaum intelektualis ini tentu saja menghendaki masyarakat yang bebas dari pengawasan kolonial, yang dengan sadar ingin mengubah kedudukan bangsanya²⁹.

Melihat Nasionalisme di era Pra Kemerdekaan perjuangan dan paham Nasionalisme yang berlangsung sejak satu abad silam mewujud dalam berdirinya negara yang merdeka, Walaupun sekitar setengah abad kemudian banyak pertumpahan darah atau siksa batin dan raga. tekad untuk memerdekakan bangsa dari belenggu penjajahan jauh lebih kuat. Di sini Nasionalisme berarti membebaskan. Pada situasi seperti inilah Nasionalisme menunjukkan pengertian dan maknanya yang sejati dan asli.

Di era pra kemerdekaan ini semangat Nasionalisme Indonesia sudah mulai terasa pada saat berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo pada tahun 20 maret 1908³⁰, bertempat di jalan Abdurrahman Saleh 26 Jakarta yang diketuai oleh Soetomo. walaupun organisasi ini pada awalnya didirikan oleh para pelajar dan mahasiswa Jawa dan Madura tapi orang lainpun bisa masuk, Seperti Orang-orang sunda yang ikut dalam organisasi ini, bahkan meluas seluruh penduduk Hindia. Nama itu punya arti cendekiawan, watak atau kebudayaan yang mulia. Budi Utomo menetapkan perhatiannya pada penduduk Jawa dan Madura, dengan bahasa melayu sebagai bahasa resminya.

²⁹*Ibid*, h. 4

³⁰Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908 – 1918* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 1989), h. 41

Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern, dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota. Lahirnya Budi Utomo, telah merangsang berdirinya organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan sosio-politik Indonesia.

Budi Utomo bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial, karena Budi Utomo menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu sehingga wajar jika Budi Utomo berorientasi kultural. Dalam perjalanannya, Budi Utomo dengan fleksibilitasnya itu mulai menggeser orientasinya dari kultur ke politik. Edukasi barat dianggap penting dan dipakai sebagai jalan untuk menempuh jenjang sosial yang lebih tinggi³¹.

Sementara itu, lahirnya Budi Utomo banyak dihubungkan dengan “Timur telah sadar”, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1904-1905, dan akibat perkembangan politik etis. Dari alasan-alasan di atas tidak ada satupun yang dianggap tepat. Akan yang lebih penting adalah munculnya kaum elit baru sebagai produk politik etis dan ilham dari luar negeri bahwa kekuatan asing dapat dilawan dan supremasi bangsa Barat dapat dikalahkan.

Organisasi ini mengilhami berdirinya banyak organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes yang pada puncaknya mereka mengikrarkan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia, walaupun sumpah pemuda bukan identik dengan Nasioanlisme tetapi merupakan kebersamaan dalam pluralitas yang sangat dibutuhkan dalam usaha mengintegrasikan bangsa, yang berarti sejalan dengan hakikat Nasionalisme. Menurut Sartono Kartodirdjo, Sebelum sumpah pemuda pada tahun 1925 tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia telah mengeluarkan manifesto politik yang mendeklarasikan ideologi nasional yang mendasar, yaitu³²: pertama, Rakyat Indonesia perlu diperintah oleh Pemerintah yang dipilih sendiri.

³¹*Ibid*, h. 15

³²Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa* (Yogyakarta: Adutya Media, 1993), h. 42

Kedua, dalam memperjuangkan tujuan itu rakyat Indonesia tidak mengharapkan bantuan pihak lain, kesemuanya harus berdasarkan kekuatan sendiri. Ketiga, untuk mensukseskan perjuangan itu, maka mereka yaitu rakyat harus bersatu.

Dalam Manifesto tersebut pertama kali dijumpai konsep bangsa Indonesia, konsep negara nasion, sekaligus identitas nasional. Konsep ini semakin lengkap dan bulat dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Secara implisit Manifesto tersebut memuat paham nasionalisme sebagai anti kolonialisme dan prinsip-prinsip: 1) kesatuan (*unity*), 2) kebebasan (*liberty*), 3) persamaan (*equality*), 4) kepribadian (*personalism*), dan 5) hasil usaha (*performance*).

Setelah Budi Utomo, lahir Sarekat Islam (SI) yang didirikan pada akhir tahun 1911 atau awal tahun 1912 di Surakarta. Secara umum diterima bahwa gerakan ini dibentuk H. Samanhudi, seorang pengusaha batik terkenal di kampung Lawean. Yang merupakan salah satu pusat terpenting kerajinan batik di Indonesia yang dalam abad ke 19 berhasil menyaingi kerajinan tekstil Eropa, dengan keberhasilannya ditemukannya metode cap. Kerajinan batik Surakarta berada dalam tangan penguasaha-pengusaha Jawa, Arab dan Cina. Jumlah pengusaha Jawa yang mayoritas, dengan tenaga kerjanya dari orang-orang Jawa juga. Dalam sejarah dinyatakan bahwa pembentukan SI ini adalah reaksi terhadap kegiatan orang Cina dalam perdagangan batik. Sebagai akibat digantikanya tekstil pribumi dengan bahan-bahan Cina yang diimpor, sehingga hal ini mengakibatkan seluruh industri batik jatuh kedalam tangan orang Cina.

Di samping itu, SI menitikberatkan pada hubungan spiritual agama dan perdagangan yang berkembang menjadi gerakan Nasionalisme rakyat yang pertama di Indonesia. Pada akhirnya SI pecah menjadi dua, yaitu SI putih yang mengutamakan idiologi Islam dan Pan Islamisme, dan SI merah di bawah Semaun, Darsono, dan Tan Malaka yang cenderung ke kiri, yang akhirnya menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berpegang pada sosialisme dan internasionalisme dan menganggap Nasionalisme sebagai musuh. Pada tanggal 23

Mei 1920 berdirilah Partai Komunis Indonesia. Pendirian PKI sendiri sesungguhnya banyak didukung oleh Komunistische Internationale pasca Revolusi Rusia. Oleh karena itu, sesuai dengan sikap dan aksi gerakan, PKI dengan orang-orangnya yang mantan anggota SI yang dipecat karena berlakunya disiplin partai, dalam gerakan radikalisasinya bukan cuma ditujukan kepada pemerintah kolonial, akan tetapi juga ditujukan kepada organisasi lain. Pada kongres istimewa, 24 Desember 1920, Semaun sebagai pemimpin PKI menuduh SI sebagai pergerakan rakyat yang menyokong kapitalisme.

Pada waktu dirinya merasa kuat PKI melakukan pemberontakan, aksi-aksinya itu mencapai puncaknya pada tahun 1926 dengan melakukan pemberontakan di Jakarta dan Tangerang (12 – 14 November 1926), di Banten (12 November – 5 Desember 1926), di Priangan (12 – 16 November 1926), di Solo (17 – 23 November 1926), di Kediri (12 November – 15 Desember 1926), dan baru pada tahap rencana untuk daerah-daerah Banyumas, Pekalongan, dan Kedu. Sedangkan di Sumatera pemberontakan ini biasa disebut Pemberontakan Silungkang, Januari 1927³³. Akan tetapi pemberontakan tersebut gagal dan akhirnya dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Kemudian pada 25 Desember 1912 lahir partai yang berjiwa Nasionalis yaitu Indische Partij yang didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker di Bandung, tetapi tidak mendapat sambutan rakyat. Yang menjadi keistimewaan dari IP ini adalah usianya yang sangat pendek, tetapi anggaran dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. IP merupakan organisasi campuran yang menginginkan kerjasama orang Indo dan Bumiputera. Gerakan IP sangatlah mengkhawatirkan pemerintah Kolonial Belanda, karena IP bersifat radikal dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Keadaan itu yang menyebabkan pemerintah bersikap keras terhadap IP, pada akhirnya permohonan IP untuk mendapatkan badan hukum sia-sia belaka dan organisasi ini dinyatakan sebagai partai terlarang sejak 4 Maret

³³M. Dimjati, *Sedjarah Perjuangan Indonesia* (Djakarta: Widjaja, 1951), h. 23

1913. Para pemimpin IP pun ditangkap dan dibuang ke tempat-tempat yang jauh. Usia IP sangat pendek, namun bagaikan sebuah tornado yang melanda Jawa. Oleh penerusnya setelah IP dibubarkan dan pimpinannya di buang kemudian organisasi itu bernama Insulinde³⁴.

Pada 4 Juli 1927 Ir. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI)³⁵ yang mayoritas anggotanya berasal dari Algemene Studie Club Bandung yang merasa aspirasinya tidak tersalurkan pada organisasi lain. Hal ini merupakan wadah Nasionalisme modern yang radikal. Ideologi partai tersebut nasional radikal, yang dalam pandangan Bung Karno dianggap bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme (NASAKOM). Lahirnya PNI dinilai sebagai peningkatan semangat perjuangan kemerdekaan, mengingat beberapa faktor yang mendorongnya. PNI didirikan dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka dengan asas yang dinamakan Marhaneisme, menolong diri sendiri dan non kooperasi. Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah massa aksi nasional yang sadar dan percaya pada kekuatan sendiri.

Setelah itu, diikuti kelahiran banyak organisasi, baik yang bercorak keagamaan, politik maupun kepemudaan, seperti Muhammadiyah³⁶, Nahd}otul ‘Ulama>’³⁷, Christelijke Ethische Partij (1916), Indische Katholieke Partij (1918), Jong Java (1915), Jong Sumatera Bond (1917), dll. Lahirnya beraneka ragam organisasi dapat dikatakan bahwa Nasionalisme sudah mulai tumbuh karena senasib sependeritaan, yang menginginkan bebas dari penjajahan Belanda, dan

³⁴Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si. dan Encep Supriatna, M.Pd., *op. cit.*, h. 30

³⁵Drs. RZ. Leirissa, MA, *Terwujudnya suatu gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 – 1950* (t.tp.: CV. Akademika Pressindo, 1985), h. 48

³⁶Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta tanggal 18 Nopember 1912, organisasi ini bertumpu pada cita-cita agama. Sebagai aliran modernis Islam, organisasi ini ingin memperbaiki agama umat Islam Indonesia. Agama Islam sudah tidak utuh dan murni lagi karena pemeluknya terkungkung dalam kebiasaan yang menyimpang dari asalnya yaitu Kitab Suci Alquran.

³⁷NU adalah organisasi sosial keagamaan atau jam‘iyyah diniyah Islamiyah yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 dan diketuai oleh KH Hasyim asy-Sy‘ari. pemegang teguh salah satu dari empat madzhab berhaluan Ahlusunnah wal jam‘ah, yang bertujuan tidak saja mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam tetapi juga memperhatikan masalah sosial ekonomi, dan sebagainya, dalam rangka pengabdian kepada umat manusia.

ingin mewujudkan cita-cita yaitu masa depan yang lebih baik, yang oleh Anderson disebut *Imagined Political Community*.

Nasionalisme mencapai puncaknya saat dibentuknya BPUPKI. Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, yang mana pada waktu itu Jepang memberikan izin Dokuritsu Zyunbi Inkai (Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) untuk memulai usahanya bagi Indonesia. Pada akhirnya berdirilah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945 yang beranggotakan 70 orang yang termasuk di dalamnya 7 orang Jepang. Pada awalnya yang akan menjadi ketua adalah Ir. Soekarno, tetapi dengan alasan tertentu Akhirnya ditunjuk Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua dengan wakilnya R.P. Soeroso, tujuan pembentukannya adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia Merdeka.

Pada sidang BPUPKI yang pertama dibicarakan tentang berbagai macam pendapat mengenai dasar negara yaitu pendapat Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan lima dasar Negara yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Soepomo mengusulkan dasar Negara adalah Integralistik yaitu Negara bersatu dengan rakyat yang mengatasi seluruh golongan dalam lapangan apapun. Sedangkan Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar Negara. Oleh karena terjadi deadlock dalam sidang I BPUPKI, karena adanya perbedaan pendapat tentang dasar negara, yaitu kelompok nasionalis islam dan nasionalis sekuler, maka BPUPKI kemudian membentuk panitia sembilan yang terdiri dari: Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Soebardjo, AA Maramis, Soekarno, Abu Kahar Moezakir, Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejono dan Agus Salim. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka dalam rumusan yang dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan lengkapnya adalah: ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan³⁸.

Pada persidangan kedua (10-17 Juli 1945) terjadi perdebatan sengit menyangkut redaksi yang krusial yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Persoalan itu akhirnya berakhir ketika Ir. Soekarno menyakinkan peserta sidang bahwa apa yang dihasilkan Panitia sembilan dalam bentuk Piagam Jakarta adalah *modus vivendi*, yaitu kesepakatan luhur Bangsa Indonesia. Pendapat Ir. Soekarno itu akhirnya mampu mengakhiri perdebatan mengenai Sila I Piagam Jakarta dalam Sidang II BPUPKI. Meskipun demikian, atas kebesaran jiwa orang-orang Islam dan demi menjaga persatuan maka rumusan kalimat tersebut akhirnya dihapus dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945³⁹.

Sementara Nasionalisme pasca proklamasi terjadi ketika Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengalami pemboman di Hiroshima dan Nagasaki, tak ada pilihan lain selain menyerah ke Sekutu. Karena Sekutu belum datang menerima penyerahan itu, terjadi kevakuman kekuasaan di Indonesia. Inilah kesempatan yang dimanfaatkan oleh pejuang kita, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Maka cita-cita Nasionalisme nomor satu dan dua yang dijelaskan oleh Hertz telah tercapai yaitu persatuan nasional dan kebebasan nasional dari penjajah asing.

Namun Belanda dengan membonceng tentara sekutu mendarat di Indonesia dalam upaya merebut dan menduduki kembali Indonesia. Terjadilah bentrok bersenjata di berbagai tempat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga banyak para pahlawan dan syuhada>' yang gugur di medan perang. Pada 18 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua dan

³⁸Abdul Choliq Murod, *op. cit.*, h. 49-50

³⁹*Ibid*, h. 50

keesokan harinya 19 Desember 1948 Yogyakarta berhasil diduduki Belanda. Pada saat itu para pemimpin republik membiarkan diri ditangkap. Aksi ini mengejutkan dunia sehingga dewan keamanan PBB meminta untuk dilakukan gencatan senjata⁴⁰.

Pada 1 Agustus 1949 diumumkan gencatan senjata dan pada 27 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, dengan bentuk Republik Indonesia Serikat, tetapi tidak termasuk Papua,. Setelah melalui pergulatan politik sepanjang paruh pertama tahun 1950, akhirnya pada 17 Agustus 1950 semua struktur konstitusional semasa revolusi dihapuskan. Bentuk negara serikat diganti dengan negara kesatuan dengan Jakarta sebagai ibu kota. Revolusi belum selesai dan Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Semuanya itu menyebabkan berkembangnya radikalisme di penghujung periode 1950an. Pada era tersebut dicoba kehidupan demokrasi liberal dengan multi partai dan sistem pemerintahan parlementer. Hal itu menyebabkan instabilitas politik, sehingga terjadi banyak perubahan kabinet. Pada ujungnya, pemerintahan tidak efektif pada masa itu. Pada 19 September 1953 Daud Beureuh mengumumkan Aceh sebagai Darul Islam, lepas dari Jakarta⁴¹.

Pada Bulan September 1957 Daud Beureuh menerima gencatan senjata setelah Jakarta mengembalikan Aceh sebagai propinsi sendiri lepas dari Sumatera Utara. Pemberontakan Darul Islam menyebar luas di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Akhirnya semua pemberontakan dapat dipadamkan kemudian pemilihan umum yang pertama dapat diselenggarakan pada 29 September 1955, lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke TPS (tempat pemungutan suara). Sebanyak 37.875.299 atau 87,65 persen dari 43.104.464 orang yang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya, memberikan suara sah⁴². Dengan menghasilkan empat partai besar yaitu PNI mendapat suara 8.434.653 atau 22,3% dengan 57 kursi,

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

⁴²Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 57

MASYUMI meraih suara 7.903.806 atau 20,9% dengan 57 kursi, NU mendapat 6.955.141 atau 18,4% dengan 45 kursi dan PKI memperoleh 6.176.914 atau 16,4% dengan 39 kursi⁴³ dari total kursi yang diperebutkan 257 kursi.

Dekrit 5 Juli 1959 menandai babak baru ketatanegaraan Indonesia yaitu kembali ke UUD 1945 dengan sistem pemerintahan presidensiil, dan akhirnya presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Gelombang radikalisme terus menguat dengan terus dipelopori oleh kaum muda PKI dan PNI, sehingga terjadi nasionalisasi perusahaan asing, terusirnya warga asing termasuk orang-orang Cina. Pada kurun itu Indonesia berjuang untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda dan terlaksana pada 1962. kekuasaan PKI semakin kuat dengan memenangkan banyak kursi pada parlemen daerah. Yang menggeser PNI, PKI mampu memobilisasi massa dalam mendukung pembebasan Irian Barat, dan perlawanan terhadap Malaysia yang dianggap sebagai neo kolonialisme. Masa kejayaan Soekarno berakhir dengan tragedi nasional yaitu pemberontakan PKI dan terbunuhnya beberapa jendral serta pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI.

Dari sini dapat kita lihat Nasionalisme Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan hingga runtuhnya rezim Soekarno mengambil bentuk perlawanan fisik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, pemantapan ideologi bangsa (pancasila), pembuatan undang-undang dasar sebagai pembeda dengan bangsa lain (UUD 1945), nasionalisasi perusahaan asing dan pengusiran warga asing⁴⁴.

Nasionalisme pada era Orde Baru ditandai dengan penegasan kembali jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945 dan penggalan kebudayaan nasional, tetapi pada prakteknya terjadi jiwanisasi dalam segala bidang, baik dalam militer, bahasa, kebudayaan, dll. Orde baru pada awalnya menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia agar mampu membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, ternyata Orde Baru membangun kekuasaannya atas dasar represi

⁴³*Ibid.*, h. 84

⁴⁴Abdul Choliq Murod, *op. cit.*, h. 51

hegemoni, sentralistik dan otoriter yang tidak membuka ruang sedikitpun bagi kritik apalagi oposisi, sehingga Orde Baru dapat menciptakan powerful state (negara kuat). Kebijakan politik Orde Baru ini mampu membawa stabilitas politik dan keamanan yang tak tertandingi dalam sejarah Republik Indonesia. Akan tetapi, seiring dengan situasi yang terus berubah, dengan masuknya arus globalisasi dan informasi maka tuntutan masyarakat akan terjadinya transparansi dalam politik dan ekonomi, demokratisasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia semakin tinggi, pada akhirnya rezim Orde Baru tidak mampu menahan tuntutan masyarakat dan runtuhlah rezim tersebut dengan mundurnya presiden Soeharto pada Mei 1998.

Indonesia memasuki reformasi dengan gonjang-ganjing, terjadi pembakaran gereja di Jakarta, pembakaran masjid di Kupang, muncul kasus Sampit, Maluku, Poso dan lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka. Pada era ini Indonesia menghadapi dua proses disintegrasi sekaligus, yaitu disintegrasi vertikal yang ditandai konflik social antar ras dan antar pusat dan daerah, dan disintegrasi horizontal yang ditandai konflik antar suku, ras, agama dan golongan. Pada era ini menguat tuntutan identitas etnis atau ethno nasionalism yang disuarakan oleh Timor Timur (sudah merdeka) Aceh (mendapatkan otonomi khusus) dan Irian Jaya. Disamping itu kita juga menyaksikan terjadinya penguatan primordialisme agama dengan marak organisasi keagamaan yang radikal dan militan seperti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam) dll. Serta ada yang menuntut diberlakukannya hukum syariah, dan tuntutan sistem kekhalifahan, seperti Hizbut Tahrir Indonesia⁴⁵.

3. Nasionalisme Dalam Islam

Paham kebangsaan (Nasionalisme) yang pertama kali memperkenalkan kepada umat Islam adalah Napoleon pada saat ekspedisinya ke Mesir. Lantas, seperti telah diketahui, setelah Revolusi 1789, Perancis menjadi salah satu negara

⁴⁵*Ibid*, h. 52-53

besar yang berusaha melebarkan sayapnya. Mesir yang ketika itu dikuasai oleh para Mamluk dan berada di bawah naungan kekhalifahan Usmani, merupakan salah satu wilayah yang diincarnya. Walaupun penguasa-penguasa Mesir itu beragama Islam, tetapi mereka berasal dari keturunan orang-orang Turki.

Napoleon mempergunakan sisi ini untuk memisahkan orang-orang Mesir dan menjauhkan mereka dari penguasa dengan menyatakan bahwa orang-orang Mamluk adalah orang asing yang tinggal di Mesir. Dalam maklumatnya, Napoleon memperkenalkan istilah *al Ummat al Misriyah*, sehingga ketika itu istilah baru ini mendampingi istilah yang selama ini telah amat dikenal, yaitu *al Ummah al Islamiyah al Ummah al Misriyah* dipahami dalam arti bangsa Mesir. Pada perkembangan selanjutnya lahirlah *umamah* lain, atau bangsa-bangsa lain⁴⁶.

Islam pada awalnya memiliki citra dan cerita yang positif karena penyebarannya dengan jalan damai dan berperan dalam peningkatan peradaban manusia. "Bahkan secara politis Islam telah menjadi kekuatan dominan yang mampu menyangga dan mempersatukan penduduk nusantara yang bertebaran ini ke dalam sebuah identitas baru yang bernama Indonesia, sekalipun pada akhirnya secara legal formal ikatan keindonesiaan ini diatur dan diperkuat oleh administrasi dan ideologi negara"⁴⁷.

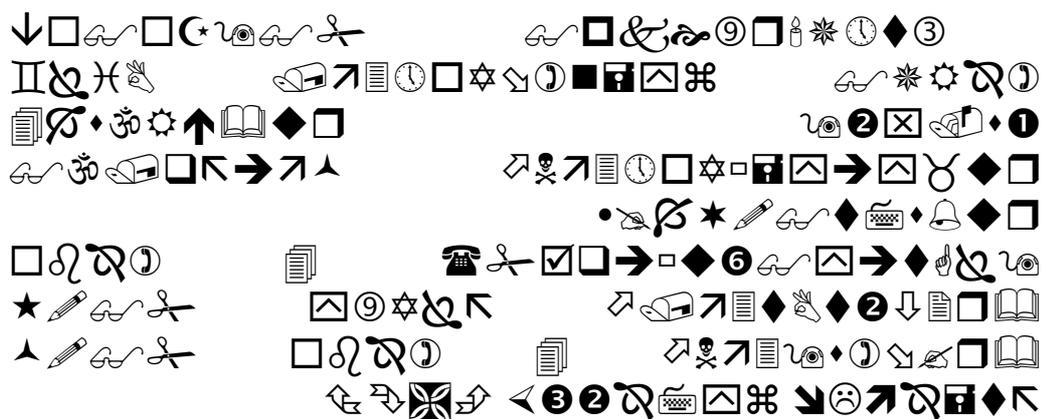
Di dalam Islam tidak ada larangan untuk mencintai bangsa dan tanah air. Sehingga di dalam Alquran Nasionalisme digambarkan dalam bentuk persatuan untuk mempertahankan kokohnya suatu negara dari ancaman negara lain yang ingin menjajah dan menguasainya. Karena Nasionalisme merupakan salah satu pendorong yang sangat penting sekali untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan cinta bangsa dan tanah air. Dan persatuan adalah merupakan faktor yang dapat menumbuhkan potensi kekuatan fisik dan mental yang tangguh

⁴⁶DR. Muhammad Quraish Shihab, MA. *Wawasan Al Qur'an (Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 13, h. 329

⁴⁷Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa* (Yogyakarta: Galang Press, 2000), h. xxv

serta Nasionalisme dapat membangkitkan kasih yang senasib dan seperjuangan, dan membangkitkan perlawanan kepada imperialisme.

Di dalam Alquran kata *sya'ab* disebut sekali dalam bentuk plural (yang pada mulanya mempunyai arti cabang dan rumpun) yaitu: *syu'uban* yang tercantum pada surat al H{ujurat ayat 13:



Artinya: “Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT. ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui dan Maha mengenal”⁴⁸.

Pada ayat tersebut jelas bahwa Alquran telah memperkenalkan konsep bangsa (Nasionalisme), dengan kata lain Islam mengakui adanya rasa kebangsaan atau kedaerahan. Rasa kebangsaan ini ditujukan dengan sikap *lita'a>rafu>* (saling kenal mengenal dan harga menghargai).

Sebagaimana sikap Nasionalisme Nabi Muhammad Saw. dibuktikan pada saat beliau berada di kota Madinah keadaan Nabi Muhammad Saw. dan Umat Islam mengalami perubahan yang besar. di Madinah Nabi Muhammad Saw. menghadapi masyarakat mejemuk yang memiliki tingkat rivalitas yang relatif tinggi, dengan demikian maka Nabi Muhammad Saw. merasa perlu penataan dan pengendalian untuk mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial,

⁴⁸Depag. RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), h. 847

ekonomi, politik dan agama. Sehingga pada saat itu, Rasulullah Saw merasa perlu mengikat seluruh penduduk Madinah untuk mengadakan perjanjian yang disebut piagam Madinah. Piagam itu dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya *nation state* oleh Montgomery Watt dan Bernard Lewis⁴⁹.

Madinah saat itu dihuni oleh kaum Ans}or yaitu penduduk asli yang telah memeluk Islam, dan kaum Muhajir yang berasal dari Mekah dan menetap bersama Nabi atau setelah itu. Kaum Ans}or sendiri terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Kaum muslim bukanlah satu-satunya yang menghuni kota Madinah. Disamping muslim menghuni juga kaum Yahudi, Kristen, Majusi (penyembah api) dan sisa-sisa orang Arab yang masih menyembah berhala. Piagam Madinah merupakan landasan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi penduduk Madinah yang majemuk. Adapun isi pokok piagam Madinah antara lain: *pertama*, semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas. *Kedua*, hubungan antara sesama komunitas Islam dan antara komunitas Islam dengan non Islam didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membantu mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama⁵⁰.

Sejarah mencatat, bahwa ketika berada dan berdakwah di Makkah, Muhammad mengalami berbagai hambatan dan tantangan dari kalangan kafir Quraisy Makkah. Melihat sulitnya mendakwahkan Islam dalam situasi seperti itu, Nabi Muhammad Saw. mulai mencari solusi alternatif wilayah baru yang kondusif bagi penyiaran Islam. Menurut at} T}abari>, daerah yang pertama kali menjadi tujuan nabi Muhammad Saw. adalah Abysinia, suatu daerah yang makmur yang mengundang orang-orang Quraisy berdagang di sana. Tidak hanya sebatas itu, kehidupan keagamaan di sana juga bersikap toleran dan bahkan ada

⁴⁹Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai* (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 241

⁵⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara. Ajaran, sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 13-14

jaminan keamanan bagi masing-masing pemeluknya. Merasa khawatir atas keselamatan warganya dari serangan kafir Quraisy yang cukup banyak mendiami tempat tersebut, Muhammad memerintahkan mereka untuk pindah ke Yasrib⁵¹, yang kelak dinamai Madinah.

⁵¹Asghar Ali Engener, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 138